

LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA JAMBI
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya Alhamdulillah Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memenuhi/melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan ini jauh dari kesempurnaan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan Laporan ini kedepan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Instansi dan selanjutnya atas sumbang saran yang diberikan kami haturkan terima kasih.

Jambi, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Jambi



Ir. MEIZADIARTY, MMA
Pembina TKU
NIP. 19690512 199303 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	4
1.5 Fungsi dan Isu Strategis Organisasi	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	17
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	17
2.1.2 Kebijakan dan Program	19
2.2 Indikator Kinerja Sasaran	25
2.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Pengukuran Kinerja	30
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	25
3.2.2 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	40
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan	64
3.2.4 Prestasi Tahun 2021	68
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021.	30
3.2	Pencapaian Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021	35
3.3	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2021	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya suatu kewajiban pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini semata-mata tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menganalisa kelemahan pelaksanaan kegiatan pemerintah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Terciptanya pemerintahan yang bersih serta mampu menyediakan “*Public Good and Service*” dengan menerapkan “*Good Governance*” dalam penyelenggaraannya merupakan pra-syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Agar menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat) dan supaya efektif diperlukan koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Kewajiban tersebut tentunya termasuk bagi pemerintah daerah beserta dengan perangkatnya, tidak terkecuali Pemerintah Kota Jambi. Berkaitan dengan itu, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Jambi, juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD menuju terwujudnya *good governance* yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKj Tahun 2021 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, Percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan fungsi perikanan, peningkatan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kota Jambi secara keseluruhan.

LKj Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Performance Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang

merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 sebagai kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

1.3. Tujuan

Secara umum, penyusunan LKj merupakan bentuk kewajiban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mempertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Tujuan khusus penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, LKj juga dapat dijadikan sebagai *feed back* yang berharga dalam memperbaiki kinerja Pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi di masa mendatang.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organsiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pertanian dan Perikanan

c. Fungsi

Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk menyelenggarakan tugas pokok antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, dan Ketahanan Pangan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c) Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d) Penataan Prasarana Pertanian;
- e) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ikan, ternak dan hijauan pakan ternak;
- f) Pengawasan peredaran sarana pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- g) Pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- h) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- k) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
- l) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, peternakan dan perikanan;
- m) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- n) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- p) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah:

A. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, keamanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. pemberian bimbingan teknis;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan,

Distribusi dan Cadangan Pangan, dan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
- j. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - d. Pendampingan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, pengorganisasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- E. Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing seksi;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidnag berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Penilaian hasil kerja bawahan;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan teknologi;
 - g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - j. Pelaksanaan system pengendalian intern;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- F. Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan;
 - b. pengamanan teknis di bidang perikanan;
 - c. bimbingan teknis di bidang perikanan;
 - d. pengembangan produksi perikanan;
 - e. pembinaan dan pengembangan usaha;
 - f. pembinaan pasca panen hasil perikanan;
 - g. dan rehabilitasi sumberdaya perairan;
 - h. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan;
 - i. pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos kesehatan ikan terpadu; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi dibidang pertanian.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang kelembagaan dan Pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata dan metode penyuluhan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- e. Pengkoordinasian di bidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;

- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian ; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, Terdiri :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- d. Bidang Keamanan Pangan, terdiri :
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- f. Bidang Perikanan, terdiri :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumber daya Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri :
 - 1. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;

2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, terdiri:
1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
 2. Seksi Tata dan Metode Penyuluhan;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanian.
- i. Unit Pelaksana Tugas, terdiri:
1. UPT Penyuluhan Pertanian;
 2. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
 3. UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Simpang Rimbo dan Danau Teluk;
 4. UPT Balai Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
 5. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Penyuluh.

1.5 Fungsi dan Isu Strategis Organisasi

Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Jambi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkontribusi mewujudkan Misi ke-4 sesuai dengan kewenangan yaitu : **“Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”**. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif (pertumbuhan, pemerataan dan Aksesibilitas) dan indikator tujuannya yaitu Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan indikator sasaran adalah meningkatnya ketersediaan pangan utama, yakni dengan strategi menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan keamanan pangan.

Isu strategis atau permasalahan utama (strategic issued) berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 adalah:

1. Minimnya ketahanan pangan;
2. Rendahnya keamanan Pangan;
3. Rendahnya diversifikasi pangan;
4. Tidak adanya data bahan pangan layak dan aman dikonsumsi;
5. Rendahnya sarana dan prasarana keamanan pangan;
6. Minimnya keamanan daging konsumsi secara Aman. Sehat, Unggul dan Halal;
7. Minimnya sarana dan prasarana RPH sesuai SNI;
8. Rendahnya daya saing produk perikanan;
9. Rendahnya produktivitas perikanan;
10. Menurunnya biodiversitas spesies perikanan, dan;
11. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian dan perikanan.

Prioritas Pembangunan dari isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan;
2. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan;
3. Menciptakan pertanian yang diminati generasi muda;
4. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif;
5. Pengembangan komoditi unggulan hortikultura;

6. Penggunaan Iptek yang kreatif dan inovatif, dan
7. Pengembangan sistem kesehatan hewan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, fungsi strategis SKPD, permasalahan utama yang dihadapi dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Menyajikan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis, Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan Tinjauan Umum Capaian Kinerja dan Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Guna meningkatkan dan mengefektifkan kinerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi dalam mewujudkan visi dan misinya dalam situasi lingkungan yang berubah dengan sangat cepat, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai acuan kerja sekaligus bahan evaluasi menyeluruh dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2018-2023;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai sasaran dan lokusnya selama 2 tahun kedepan;
- c. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2018-2023 kedalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 2 tahun (2018-2019).

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Walikota Jambi, Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi OPD DPKP, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya ketersediaan pangan; dan
2. Meningkatnya keamanan pangan.

1. Terpenuhinya ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan yang cukup berarti terpenuhinya pangan yang cukup, bukan hanya beras melainkan juga mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan (suryana, 2003). UU No. 07 Tahun 1996 menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, merata dan terjangkau.

2. Meningkatnya Keamanan Pangan.

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 menyatakan bahwa pangan yang tersedia harus cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Begitu pentingnya aspek keamanan dan mutu ini, FAO/WHO pada tahun 2014, kembali menekankan bahwa adalah hak bagi setiap individu untuk memperoleh pangan yang aman, cukup dan bergizi. Hal ini penting diungkapkan supaya pemerintah mempunyai komitmen lebih baik untuk memastikan keamanan pangan.

2.1.2 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat
2. Meningkatkan usaha pertanian perkotaan melalui pemilihan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi dan mempunyai peluang pasar
3. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan cakupan pemeriksaan produk pangan

b. Program

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerahkabupaten/Kota, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menangani 2 (dua) urusan yaitu :

1. Urusan Wajib, menyangkut urusan ketahanan pangan
2. Urusan Pilihan, menyangkut urusan pertanian yaitu pertanian, peternakan dan perikanan

Dalam melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misinya, maka disusun Program, Kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan sekaligus pendanaan indikatifnya. Jumlah Program dan Kegiatan yang disusun untuk tahun 2021 sebanyak 12 Program, 27 kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan. Dan Adapun Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian;
 - c) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan;
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor ;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Kegiatan Pengadaan Baran gMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Mebel;
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;.
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan POkok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
 - a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Ytarget KONsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - a) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 1) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
 - a) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
 - 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- a) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di kecamatan serta Sarana Pendukungnya;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 1) Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
 - b) Penanggulangan Daerah terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

- 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan.
 - 4) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan.
12. Program Penyuluhan Pertanian
- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 2 (Dua) indikator sasaran yang terbagi menjadi 2 (Dua) indikator pada kegiatan dan 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.
1. Terpenuhinya ketersediaan pangan	a. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) <ul style="list-style-type: none"> - PPH Ketersediaan <ol style="list-style-type: none"> a. Energi (gr/Kapita/hari) b. Protein per kapita - PPH Konsumsi 	
2. Meningkatnya Keamanan Pangan	b. Persentase Peningkatan Pangan Aman Konsumsi	

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2021 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Walikota Jambi untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati, sebagaimana tampak dibawah ini:

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1.	Persentase Peningkatan SKOR PPH a. PPH Ketersediaan - Energi dan - protein perkapita	3.080 gr/kap/hr 82 gr/kap/hr
2.	Meningkatnya Keamanan pangan	1.	PPH Konsumsi	91,6
		2.	Persentase peningkatan pangan aman konsumsi	87 %

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.874.550.200,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	468.879.466,00
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	65.203.125,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	163.653.064,00
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	46.082.285,00
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	78.960.764,00
7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.082.180,00
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	465.798.089,00
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	60.307.379,00
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	419.202.100,00
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.508.216,00
12.	Program Penyuluhan Pertanian	72.818.095,00
Total Anggaran		17.683.759.829,00

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua
Walikota Jambi

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Jambi

dto

dto

H. SYARIF FASHA, ME

Drs. HR. ERWANSAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610911 198303 1 003

Kebijakan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Jangka Menengah Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing
2. Memfasilitasi promosi pemasaran dan hasil olahan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan
3. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman
4. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Jambi
5. Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia)
6. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelembagaan tani

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai.

Laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap OPD atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja OPD).

Akuntabilitas Kinerja DPKP menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut

kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal berdasarkan permendagri No. 54 Tahun 2010, sebagai berikut ;

Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja Organsiasi

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan dalam tabel berikut :

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	
1.	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan	1	Persentase Peningkatan SKOR PPH					
		b.	PPH Ketersediaan - Energi dan	2.989 gr/kap/hr	3.012 gr/kap/hr	3.080 gr/kap/hr	2.813 gram/kap/hari	91,33 %
			- Protein perkapita	79 gr/kap/hr	99,14 gr/kap/hr	82 gr/kap/hr	78,19 gram/kap/hari	95,35
		PPH Konsumsi	91	91,5	91,6	86,7	94,65 %	
2.	Meningkatnya Keamanan pangan	1	Persentase peningkatan pangan aman konsumsi	83 %	100 %	87 %	93,55 %	107,52 %

Pada tabel diatas dapat dibaca dengan kesimpulan bahwa tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan tidak terealisasi secara baik. Namun rata-rata capaian dari sasaran Strategis tersebut masih diatas 90 %. Tidak tercapainya sasaran strategis tersebut disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang melanda sehingga disemua sub sektor banyak terdampak, diataranya banyak karyawan yang berhenti dari pekerjaannya yang disebabkan perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan, dengan pendapatan menurun menyebabkan daya beli atau investasi masyarakat juga menjadi menurun.

Pada tahun 2021 IKU yang ada di RPJMD mengalami perubahan dari Skor Pola Pangan Harapan menjadi Indeks Ketahanan Pangan (IKP). PPH itu sendiri merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Pangan.

Indeks ketahanan pangan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, IKP Kota Jambi meliputi dua dimensi yaitu keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan yang dihitung dari 6 indikator yaitu :

1. Rasio luas lahan tanam pertanian (Kota Jambi bukan Daerah Sentra) ;
2. Rasio jumlah sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih;
6. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; (dinkes)

Pada rancangan perubahan RPJMD pada tahun 2021 memiliki target IKP sebesar 78 dan realisasi IKP tahun 2021 sebesar 79,73.

IKU	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ketahanan Pangan	78	79,73	102,21

Di DPKP sendiri Nilai IKP tersebut dapat naik lebih baik dengan adanya program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yaitu melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan, Bantuan bibit, Pekarangan Pangan Lestari, dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan.

Target skor PPH dalam IKU RPJMD adalah 91,6 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 86,7. Realisasi tersebut didapat dari 9 kelompok bahan pangan yang merupakan data skunder dari susenas, yang diinput pada aplikasi harmoni dari badan ketahanan pangan dengan cara mengisi baselane.

Skor PPH 86,7 dapat dilihat dari perhitungan tabel dibawah ini.

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita /Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	271.9	1,126	55.0	53.6	0.5	27.5	26.8	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	50.6	52	2.6	2.5	0.5	1.3	1.2	2.5	1.2
3	Pangan Hewani	144.3	295	14.4	14.0	2.0	28.8	28.0	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	34.7	311	15.2	14.8	0.5	7.6	7.4	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.9	11	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	1.0	0.3
6	Kacang-kacangan	20.6	47	2.3	2.2	2.0	4.6	4.5	10.0	4.5
7	Gula	15.8	60	2.9	2.9	0.5	1.5	1.4	2.5	1.4
8	Sayur dan Buah	248.6	106	5.2	5.1	5.0	25.9	25.3	30.0	25.3
9	Lain-lain	82.6	39	1.9	1.9	-	-	-	-	-
	Total		2,047	100.0	97.5		97.4	95.0	100.0	86.7

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat dari Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) dan Skor Maks (Batas Maksimal Konsumsi dari 9 bahan pangan). Semakin besar skor AKE dari skor maks maka konsumsi harus dikurangi. Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kota Jambi masih banyak mengkonsumsi karbohidrat, pangan hewan, minyak dan lemak.

Dalam melakukan perhitungan Skor PPH tersebut terdapat permasalahan diantaranya adalah :

- Masih kurangnya data 2021 digunakan untuk perhitungan tahun 2022 dikarenakan data tahun 2021 tersebut baru diterbitkan dibulan februari tahun 2022. Maka harus dikumpulkan data primer sehingga data yang di sajikan adalah data tahun berjalan sebagai pembanding sementara.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyerapan sosialisasi mengenai pangan bergizi dan seimbang

Sedangkan solusi untuk meningkatkan nilai Skor PPH tersebut dilakukan adalah :

- Meningkatkan sosialisasi pangan bergizi berimbang secara terus menerus
- Melakukan kegiatan gelar pangan secara berkelanjutan

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	2021		Capaian Kinerja 2021 (%)
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
2	3	6	7	8
Indeks KETahanan Pangan	Indikator Program 1 : Skor Pola Pangan Harapan	88,8	86,7	97,63
	Indikator Kegiatan 1.1: Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab./kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan ahrga pangan	100 %	100 %	100
	Indikator Sub. Keg.1 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pangan pokok dan pangan lainnya - Operasi Pasar Murah HBKN - Operasi Pasar Murah - Pemantauan panel harga	12kali 2kali 1 kali 12laporan	0 0 1 kali 12 laporan	100
	Indikator Kegiatan 1.2: Persentase penyediaan cadangan pangan pemerintah	17,5 %	17,5 %	100
	Indikator Sub. Keg.1 : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10,505 Ton	10.5050 kg	100
	Indikator Kegiatan 1.3 : Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100 %	100 %	100
	Indikator Sub. Keg.1 : -Pengambilan dan pengolahan data konsumsi pangan perkapita -Koordinasi dan evaluasi kegiatan konsumsi -Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pola konsumsi pangan masyarakat	7440 responden 4_kali 11_kali	0 3_kali 9_kali	Refocusing
	Indikator Sub. Keg.2 :			100

	1. Percontohan pekarangan kelompok wanita tani 2. Sosialisasi B2SA dan Pangan local 3. Lomba cipta menu	5 kwt 2 kali 2 kali	5 kwt 2 kali 2 kali	
	Indikator Program 2 : Penurunan Daerah Rawan Pangan	6 kel (40%)	3 kel	100
	Indikator Kegiatan 2.2: Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan	20 %	10 %	100
	Indikator Sub. Kegiatan 2.2.1 -Pembentukan dan Pembinaan Demapan -Pembuatan peta FSVA -Pelatihan ketersediaan pangan lokal	'4 kelurahan '1 peta '2 kali	'4 kelurahan '1 peta '2 kali	100
	Indikator Program 3 : Peningkatan Pengawasan Pangan segar Daerah	25 %	78,25 %	78,25 %
	Indikator Kegiatan 3.1 : Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kab./kota	100 %	97,46 %	97,46 %
	Indikator Sub. Kegiatan 3.1.1 : 1. Jumlah kelompok tani yang prima 3 2. Jumlah petugas pengambil contoh (PPC) 3. Pembentukan Satgas Pangan	2 KT 11 org 1 tim	4 KT 11 Org 1 Tim	> 100%
	Indikator Sub. Kegiatan 3.1.2 : 1. Pengadaan bahan/alat kedokteran/laboratorium 2. Penyediaan Reagent 3. Sertifikasi komoditi pangan prima 3	1 paket 450 reagent 5 sampel	1 paket 250 reagent 8 sampel	100 % 55,6 % >100%
	Indikator Program 4 : Produksi Perikanan Budidaya	2.536 ton	2138,1 ton	84,3 %
	Indikator Kegiatan 4.1 : Persentase pembudi daya ikan kecil yang dibudidayakan	3 %	3 %	100
	Indikator Sub Kegiatan 4.1.1 Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Kecil	3 kelompok	3 klpk	100
	Indikator Kegiatan 4.2 :		76,05 %	100 %

	Persentase Produksi benih	76 %		
	Indikator Sub Kegiatan 4.2.1 Rehab KOLam Induk	1 paket	1 paket	100 %
	Indikator Sub Kegiatan 4.2.2 Produksi benih UPTD PBAT	1.410.000 ekor	1.351.000 ekor	95,8 %
	Indikator Sub Kegiatan 4.2.2 Pengujian penyakit ikan	24 sampel	24 sampel	100 %
	Indikator Program 5 : Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum Daratan, Sungai, Danau dan Rawa	600 Ton	628,5 ton	104,75%
	Indikator Kegiatan 5.1 : Persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kab/Kota	24,5 %	25,31 %	104,37 %
	Indikator Sub. Kegiatan 5.1.1 : Restocking	36.000 ekor	24.500 ekor	68,05 %
	Indikator Program 6 : Peningkatan produksi produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan hasil Perikanan	1550 ton	1.557 ton	11,45 %
	Indikator Kegiatan 6.1 : Peningkatan produksi produk hasil perikanan	25 %	25,10 %	100 %
	Indikator Sub. Kegiatan 6.1.1 : Berkembangnya Usaha Unit Pengolahan Ikan	38 UPI		
	Indikator Program 7 : Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	20 %	20 %	100 %
	Indikator Kegiatan 7.1 : Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	14 %	14 %	100 %
	Indikator Sub. Kegiatan 7.1.1 : JUmlah saran pendukung balai penyuluh di kecamatan terbangun	1 unit	1 unit	100 %
	Indikator Sub. Kegiatan 7.1.1 : Pembangunan screen Houese Hidroponik	4 unit	4 unit	100 %

Indikator Kegiatan 7.2 : Persentase pengembangan prasarana pertanian	20 %	20 %	100
Indikator sub.Kegiatan 7.2.1 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	500 Ha	500 Ha	100
Indikator Program 8 : Peningkatan Produktivitas Pertanian	20 %		
Indikator Kegiatan 8.1 : Peningkatan Pengawasan penggunaan Alsintan, Pupuk dan Pestisida	8,6 %	11,4 %	132,5 %
Indikator Sub. Kegiatan 8.1.1 : Inventarisasi dan Pengawasan Alsintan	10 KT	7 KT	70 %
Monitoring pengawasan pupuk dan pestisida	8 KT	7 KT	87,5 %
Penataan dan Pengembangan UPJA	5 UPJA	4 UPJA	80 %
Indikator Kegiatan 8.2 : Peningkatan ketersediaan Bibit Unggul	100 %	109,4 %	109,4 %
Indikator Sub. Kegiatan 8.2.1 : Jumlah produksi bibit unggul dan calon pohon induk	2.500 batang	3.200 btg	128 %
Indikator Sub. Kegiatan 8.2.2 Terpenuhinya semen beku dan nitrogrn cair untuk inseminasi bantan	400 dosis (60 ekor)	400 dosis (60 ekor)	100
Indikator Sub. Kegiatan 8.2.3 Penyediaan Benih/Blbit Tanaman Hortikultura	4 paket	4 paket	100
Program 9 : Pengendalian KEsehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	20 %	20 %	100
Indikator Kegiatan 9.1 : Persentase pengendalian penyakit hewan dan pengujian sampel kesmavet	800 ekor	800 ekor	100
Indikator sub. Kegiatan 9.1.1 : Sosialisasi zoonosis	150 orang	150 orang	100
Tervaksinasi hewan penular rabies	800 dosis	800 dosis	100
Indikator sub. Kegiatan 9.1.2 : Pemeriksaan kesehatan hewan	3500 ekor	3500 ekor	100
Inidkator Kegiatan 9.2 :	100 %	107,89 %	107,89 %

	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan			
	Indikator sub kegiatan 9.2.1 Pelayanan Jasa medik veteriner	11.800 ekor	12.731 ekor	248,75 %
	Indikator Kegiatan 9.3 : Menjaga Pangan asal Hewan yang layak konsumsi 80 sampel			
	Indikator Sub. Kegiatan 9.3.1 : Pengujian dan pemeriksaan sampel kesmavet	80 sampel	80 sampel	100
	SOsialisasi Pangan Asal Hewan (PAH)	3 kali	3 kali	100
	Indikator Kegiatan 9.4 : Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH	80 %	76,82 %	96 %
	Indikator Sub. Kegiatan 9.4.1 : Jumlah pemotongan ternak	5200 ekor	3.925 ekor	63,4 %
	Pengendalian pemotongan betina produktif	80 %	95 %	118,75 %
	Indikator Program 10 : Luasan Pengendalian OPT	25 Ha	25 Ha	100
	Indikator Kegiatan 10.1 : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	20 %	95 %	>100 %
	Indikator Sub. Kegiatan 10.1.1 : Jumlah pengendalian OPT tanaman pangan hortikultura perkebunan	5 Ha	25 Ha	>100 %
	Indikator Program 11 : Meningkatkan produktivitas tanaman pangan	2 %	2 %	100 %
	Indikator Kegiatan 11.1 : Peningkatan jumlah kapasitas kelembagaan petani	24 KT	24 KT	100 %
	Indikator Sub. Kegiatan 11.1.1 : Metode penyuluhan	3 metode	3 metode	100 %
	Meningkatnya jumlah kelompok tani	361 klpk	42 klpk	11,63 %

Tabel 3.2 diatas tidak menampilkan capaian tahun 2020, karena pada tahun 2021 berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah. Program yang diampuh oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota menjadi 12 Program dengan 27 kegiatan dan 51 sub kegiatan, berbeda dengan tahun 2020 yang hanya terdiri dari program dan kegiatan yaitu program sebanyak 5 dan 26 kegiatan, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian antara tahun 2020 dengan 2021.

Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Laporan Indikator Kinerja Kegiatan dari setiap kegiatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Dilihat dari tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2021 menunjukkan hasil capaian kinerja rata-rata disemua kegiatan tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 terjadi pengurangan anggaran akibat dampak dari covid-19 sehingga banyak kegiatan yang menjadi target tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan bahkan ada kegiatan penunjang untuk mencapai target tidak dilaksanakan sama sekali. Seperti dihapuskannya kegiatan sosialisasi maupun bintek atau pelatihan, karena kegiatan ini mengundang banyaknya kerumunan orang dan berkurangnya juga bantuan baik dari pusat maupun provinsi

3.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan uraian data dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dari kegiatan yang tidak mencapai target dari setiap Urusan adalah :

1) Urusan Pangan (Urusan Wajib)

Bidang Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun

Dana : Rp. 58.999.738,00

CAPAIAN :

1. Terlaksananya pengambilan data konsumsi pangan rumah tangga perkapita pertahun
2. Tersusunnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengumpulan data konsumsi pangan ke masyarakat.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia terhadap pemahaman perhitungan Skor Pola Pangan Harapan
3. Kurang Responya Masyarakat terhadap petugas

SOLUSI :

1. Perlunya pelatihan perhitungan skor pola pangan harapan kepada operator
2. Perlunya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat terhadap pentingnya perhitungan skor pola pangan harapan

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dana : 81.875.000,00

CAPAIAN :

1. Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
2. Terlaksananya Sosialisasi B2SA dan Pengolahan Pangan Lokal
3. Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kelompok Wanita Tani (KWT)

PERMASALAHAN :

1. Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam menyediakan sumber pangan dan gizi keluarga.
2. Masih belum optimalnya pengolahan kearifan pangan lokal dalam meningkatkan nilai tambah produk.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman yang bisa didapat disekeliling masyarakat.

SOLUSI :

1. Memberikan bahan percontohan berupa benih untuk ditanam di lahan pekarangan anggota kelompok.
 2. Mensosialisasikan pemanfaatan pekarangan untuk penganekaragaman konsumsi pangan.
 3. Memberikan Sosialisasi tentang pengolahan pangan lokal agar dapat meningkatkan pemanfaatan kearifan pangan lokal yang dapat meningkatkan Nilai Produk.
-
3. Sub Kegiatan Koordinasi Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Dana : Rp. 233.933.478,00

CAPAIAN :

1. Terlaksananya kegiatan penyaluran pangan pokok (daging dan beras) stabilisasi harga menjelang HBKN
2. Tersedianya harga pangan pokok di 3 (tiga) pasar Kota Jambi

PERMASALAHAN :

1. Sulitnya mendapatkan data harga pasokan dan stok dari pedagang, dan distributor
2. Tidak adanya regulasi yang mengatur keluar masuknya bahan pangan
3. Tidak ada standar HET (Harga Eceran Tertinggi)
4. Belum adanya kebijakan yang menangani gejolak harga sewaktu- waktu

SOLUSI :

1. Adanya kerjasama dengan pedagang dan distributor pangan terhadap pengumpulan data
2. Perlu adanya kerjasama dengan Instansi terkait (Perhubungan) tentang regulasi pencatatan tentang keluar masuknya bahan pangan

4. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota**Dana : Rp. 90.213.250,00****CAPAIAN :**

1. Tersediannya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2. Tersedianya data cadangan masyarakat
3. Tersedianya data penggilingan padi masyarakat.

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya anggaran untuk mencukupi kuota cadangan beras pemerintah daerah

2. Tidak adanya lumbung pangan untuk menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah karna saat ini cadangan pangan pemerintah daerah Kota Jambi masih dititipkan di gudang Bulog.

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Menyangkut pada suatu Daerah Kabupaten Kota

Dana : RP. 65.203.125,00

CAPAIAN:

1. Terbentuknya dan terbinanya Desa Mandiri Pangan di 4 (empat) Kelurahan
2. Tersusunnya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) terhadap ketersediaan Energi sebesar 2.813 (Kkal/Orang/Hari) dan Protein sebesar 78.19 (gram/org/hari)
3. Tersusunnya Peta *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*
4. *Pelatihan Peningkatan Ketersediaan Pangan Lokal 2 kali*

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya data pendukung terhadap penyusunan neraca bahan makanan, pasokan dan stok.
2. Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia terhadap perhitungan neraca bahan makanan.
3. Kurang anggaran untuk melakukan pengumpulan data pendukung.

SOLUSI :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Analisis Perhitungan Neraca Bahan Makanan
2. Mengidentifikasi penyebab kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di kelurahan sehingga program dari berbagai sektor dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat kelurahan.

Bidang Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Keamanan Pangan pada anggaran Tahun 2021 meliputi :

1. Pelaksanakan Rapat koordinasi dan Inspeksi mendadak Tim Satuan Tugas Pangan Kota Jambi pada tahun 2021. Tim Satuan Tugas Pangan Kota Jambi telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Inspeksi mendadak {Sidak} sebanyak 2 kali, pelaksanaan sidak dilakukan dalam rangka pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan pangan dan pengawasan keamanan bahan pangan ditingkat pasar tradisional dan distributor di Kota Jambi pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan menghadapi pergantian Tahun baru 2022. Hasil pelaksanaan Sidak yang dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota dan Bapak Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Satgas Pangan tersebut dapat dikatakan persediaan bahan pangan dikota jambi dapat dikatakan aman dan cukup.

2. Dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan di Kota Jambi maka perlu diadakan Bimbingan teknis untuk petugas pengambil Contoh. Bimbingan teknis ini dilaksanakan 2 kali untuk 11 orang Petugas Pengambil Contoh (PPC). Peserta bimbingan teknis ini adalah penyuluh pertanian selaku aparatur yang melaksanakan pembinaan terhadap petani dan Kelompok tani selaku pelaku usaha tani sayuran dan pelaku usaha. Bimbingan teknis diberikan dengan tugas meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Petugas pengambil Contoh dalam melaksanakan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan. Selain itu juga mendapat tambahan pengetahuan tentang bahaya residu pestisida dan dapat menginformasikannya kepada para petani. Demikian juga dengan pelaku usaha (kelompok tani) dapat menerima pengetahuan secara langsung dari moderator yang disampaikan dari Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Kepala Bidang keamanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Jambi serta dari Balai pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Segar telah dilakukan di Pasar Tradisional dan Pasar Modern serta Pelaku Usaha (distributor) di Kota Jambi. Pada tahun 2021 Pembinaan yang dilakukan ke pelaku usaha dalam rangka Keamanan Pangan dan registrasi Produk serta kemasan untuk beras.
4. Produk hortikultura lokal sangat rentan mengandung residu bahan kimia dari proses budidaya hingga penanganan pasca panennya untuk mengatasi keadaan tersebut tentunya memerlukan pengendalian mutu dan keamanan pangan melalui salah satu sertifikasi prima.

Sertifikasi prima 3 adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk prima. Pada tahun 2021 bidang keamanan pangan telah melakukan pembinaan ke kelompok tani dalam rangka pembinaan Sertifikasi Prima 3. Target pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 terdapat 2 kelompok Tani yang terbina untuk sertifikasi prima 3. Namun karena pentingnya pengetahuan keamanan pangan segar kepada Pelaku Usaha dalam hal ini kelompok tani maka kegiatan tersebut bisa dilaksanakan kepada 5 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Rizki, Tunas Inti, Teman Abadi, Swadaya dan Jajaran Makmur. Kelompok tani binaan tersebut telah mengusulkan beberapa komoditi untuk mendapatkan sertifikat prima 3.

Komoditi dan kelompok yang mendapatkan sertifikat prima 3 tahun 2021:

No.	Nama Kelompok	Komoditi	Alamat
1.	Kelompok Tani Rizqie	Sawi	Kecamatan Paal Merah
		Selada	
2.	Kelompok Tani Tunas Inti	Bayam	Kecamatan Paal Merah
		Kangkung	

Bidang Keamanan Pangan juga telah melakukan pengujian sampel ke laboratorium yang terakreditasi di Laboratorium Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pekan Baru Riau Seperti tabel dibawah ini:

No.	Nama Kelompok	Komoditi	Alamat
1.	Kelompok Tani Sumber Tani	Selada	Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
		Bayam	
		Seledri	
	Kelompok Tani Margadadi 2	Pare	Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
		Timun	

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2021 Bidang Keamanan Pangan melaksanakan pengadaan reagent untuk G9 Fast Pesticides Detection Kit sebanyak 90 Buah, Rapid Test Kit Uji Methyl Yellow sebanyak 50 Buah, Rapid Test Kit Uji Rhodamin B sebanyak 50 Buah. Pengadaan ini untuk kelengkapan melaksanakan pengawasan dan pengujian pangan segar di pasar tradisional dan modern. Bidang Keamanan Pangan juga melakukan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan menggunakan G9 Fast Pesticides. sebanyak 84 Sampel ke pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Kota Jambi. Berikut Hasil dari pengujian 84 sample pangan segar asal tumbuhan tersebut :

LAPORAN HASIL UJI SAMPEL PANGAN SEGAR TAHUN 2021

NO	NAMA SAMPEL	REAGENT	HASIL UJI SAMPEL
1	SELADA CHRIS GREEN	PESTISIDA	NEGATIF
2	SAWI PAGIDA	PESTISIDA	NEGATIF
3	SELADA	PESTISIDA	NEGATIF
4	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
5	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
6	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
7	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
8	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
9	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
10	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
11	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
12	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
13	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
14	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
15	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
16	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
17	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF

18	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
19	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
20	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
21	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
22	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
23	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
24	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
25	BAYAM MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
26	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
27	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
28	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
29	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
30	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
31	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
32	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
33	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
34	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
35	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
36	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
37	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
38	SAWI HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
39	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
40	PAK COY	PESTISIDA	NEGATIF
41	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
42	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
43	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
44	WORTEL	PESTISIDA	NEGATIF
45	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
46	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
47	KENTANG	PESTISIDA	NEGATIF
48	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
49	BAWANG MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
50	CABE KERITING	PESTISIDA	NEGATIF
51	CABE	PESTISIDA	NEGATIF
52	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
53	SAWI PUTIH	PESTISIDA	NEGATIF
54	SAWI HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
55	BAYAM	PESTISIDA	NEGATIF

56	SLADA	PESTISIDA	NEGATIF
57	PAK COY	PESTISIDA	NEGATIF
58	WORTEL	PESTISIDA	NEGATIF
59	CABE RAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
60	CABE	PESTISIDA	NEGATIF
61	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
62	SAWI PUTIH	PESTISIDA	NEGATIF
63	SAWI HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
64	BAYAM	PESTISIDA	NEGATIF
65	SLADA	PESTISIDA	NEGATIF
66	PAK COY	PESTISIDA	NEGATIF
67	WORTEL	PESTISIDA	NEGATIF
68	CABE RAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
69	CABE	PESTISIDA	NEGATIF
70	TOMAT	PESTISIDA	NEGATIF
71	SAWI PUTIH	PESTISIDA	NEGATIF
72	SAWI HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
73	BAYAM HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
74	SLADA	PESTISIDA	NEGATIF
75	PAK COY	PESTISIDA	NEGATIF
76	WORTEL	PESTISIDA	NEGATIF
77	CABE RAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
78	BROKOLI	PESTISIDA	NEGATIF
79	CABERAWIT SETAN	PESTISIDA	NEGATIF
80	BAYAM MERAH	PESTISIDA	NEGATIF
81	SAWI HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
82	SELADA	PESTISIDA	NEGATIF
83	BAYAM HIJAU	PESTISIDA	NEGATIF
84	SAWI PUTIH	PESTISIDA	NEGATIF

Dalam hal ini juga dilanjutkan pengiriman sampel sebagai uji lanjutan ke Balai POM Jambi sebanyak 5 sampel dan ke Laboratorium Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pekanbaru Riau sebanyak 5 sampel pengujian residu pestisida.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan :

4. Masih adanya lahan petani yang belum teregistrasi areal pertaniannya dikarenakan bukan milik sendiri sehingga dikhawatirkan budidaya tanaman tersebut tidak berkelanjutan.
5. Belum adanya petugas pengambil contoh (PPC) yang mempunyai kompetensi secara terukur (tersertifikat).
6. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) Tim Satgas Pangan Kota Jambi pada saat selain Hari Besar / Hari Raya Keagamaan.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pangan segar yang aman konsumsi

Solusi :

1. Mendata lahan petani yang sudah teregistrasi areal pertaniannya bersama bidang tanaman pangan hortikultura
2. Mengikuti Bimbingan teknik Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bersertifikat
3. Menambah anggaran untuk pelaksanaan inspeksi mendadak (Sidak) Tim Satgas Pangan Kota Jambi pada saat selain Hari Besar / Hari Raya Keagamaan.
4. Terus meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tentang keamanan pangan segar yang aman konsumsi kepada pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi Pada umumnya

5. Mengikuti koordinasi lintas sector dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Pangan Kota Jambi.

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan :

1. Laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian sampel prima 3 hanya ada di Pekanbaru dan Sumatera Utara, sehingga ini menyulitkan untuk perlakuan terhadap sampel uji tersebut dalam pengirimannya.
2. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan Gerai Pangan Aman Bermutu, Pembuatan Leaflet dan peraga promosi dan pelaksanaan Festival pangan segar bermutu dan aman konsumsi.
3. Reagent untuk pengujian sampel pangan segar yang terbatas keersediaannya.

Solusi :

1. Melaksanakan pengiriman sampel uji secara langsung ke Laboratorium yang dituju dan mengetahui teknik perlakuan terhadap sampel yang akan diuji.
2. Menyiapkan anggaran untuk kegiatan Gerai Pangan Aman Bermutu, Pembuatan Leaflet dan peraga promosi dan pelaksanaan festival pangan segar bermutu dan aman konsumsi.
3. Menambahkan alokasi dana untuk pengadaan reagent.

2) Urusan Perikanan

Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mengampub 3 program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Prikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran hasil.

Permasalahan :

Selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 permasalahan yang dihadapi oleh bidang perikanan adalah:

- a) Sarana dan prasarana perikaan yang masih terbatas/kurang
- b) Masih kurangnya tenaga teknis perikanan terutama yang berada di UPTD PBAT;
- c) Mahalnya harga pakan ikan, sehingga sangat memberatkan petani pembudidaya ikan, karena menyebabkan tingginya cost pada usaha budidaya, dimana lebih dari 70 % cost terbesar pada usaha budidaya ikan terletak pada biaya pakan, sehingga banyak terdapat KJA dan kolam yang tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan terbengkalai;
- d) Menurunnya kualitas perairan akibat aktifitas peti di bagian hulu (kabupaten Merangin, Sarolangun dan Muaro Bungo), dan kondisi iklim yang tidak menentu sehingga menyulitkan pembudidaya ikan dalam pengaturan pola tanam yang tepat guna menghindari mortalitas yang tinggi serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian Perairan;
- e) Masih terbatasnya benih ikan yang berkualitas

- f) Kurangnya stock benih terutama untuk benih ikan nila, naik benih ikan nila produksi lokal maupun benih yang berasal dari luar;
- g) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya dalam tekhnis budidaya ikan sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- h) Masih terbatasnya modal pelaku usaha perikanan untuk pengembangan usaha, terutama dirasakan pada pandemi covid-19;
- i) Menurunnya produksi olahan hasil yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 2003,23 pada tahun 2020 menjadi 1.525,26 ton pada 2021 atau sebesar 23,86 %, hal ini disebabkan rendahnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi covid-19;
- j) Pemasaran produk hasil perikanan masih belum memenuhi standar terutama dari sisi pengemasan dan sejauh ini masih bersifat local serta baru sebagian kecil yang masuk mall/supermarket;
- k) Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang (illegal fishing) di perairan umum daratan seperti menggunakan sentrum dengan accu mobil, yang menyebabkan anak-anak dan telur ikan pun ikut mati yang akan berdampak pada kelanjutan ekosistem diperairan;
- l) Terjadinya pendangkalan Danau terutama Danau Teluk Kenali, yang mana pada saat musim kemarau dasar danau sudah kelihatan, yang mengakibatkan penurunan kualitas air dan lambatnya pertumbuhan ikan, sehingga banyak pembudidaya ikan di KJA yang tidak mengisi lagi KJAny;

- m) Ketersediaan stok sumber Daya Ikan (SDI) di perairan umum cenderung menurun yang diduga disebabkan menurunnya kualitas air perairan umum yang ada dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan;
- n) Masih terjadinya bencana banjir di Balai Benih Ikan (BBI) terutama BBI Smpang rimbo, yang menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena saluran/ sungai yang ada dilahan BBI meluap disaat musim penghujan;
- o) Ketersediaan Pakan Alami Cacing Sutera masih tergantung dari alam sehingga berpengaruh terhadap produktivitas usaha pembenihan ikan.

Pemecahan/ solusi :

- a) Menambah jumlah tenaga teknis di UPT PBAT;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan;
- c) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan melalui pelatihan keterampilan, magang dan studi banding;
- d) Peningkatan sosialisasi terutama secara persuasive kepada pembudidaya iakn untuk membuat pakan bautan berbahan baku lokal dan pembinaan tentang tehnik pemberian pakan yang efektif serta efisien, untuk menunjang hal tersebut telah diupayakan pemberian bantuan mesin pembuat pakan ikan untuk kelompok petani pembudidaya ikan serta Gerakan Pembuatan Pakan Mandiri (GERPARI);
- e) Untuk mengantisipasi penurunan kualitas sumber daya perairan dan kondisi iklim yang ekstrim, maka disarankan kepada petani untuk melakukan treatmen dan perlakuan

yang baik serta menggunakan benih yang berukuran besar (8-12 cm);

- f) Upaya untuk meningkatkan mutu benih ikan yang berkualitas salah satunya dengan pengadaan induk ikan unggul, baik kepada BBI maupun UPR/HSRT serta peningkatan sarana dan prasarana BBI, dan mengadakan Gerakan Vaksinasi Ikan (Gervikan);
- g) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani pembudidaya tentang teknik budidaya ikan yang baik, maka setiap tahun anggaran dilaksanakan kegiatan Bimtek Budidaya Ikan untuk petani pembudidaya ikan;
- h) Upaya yang telah dilakukan untuk membantu keterbatasan modal bagi petani pembudidaya diantaranya;
 - Memberikan bantuan paket percontohan budidaya ikan kepada Pokdakan yang terdiri dari pakan dan benih (APBD II), selain itu juga bekerjasama dengan UPT PBAT sei gelam dalam hal penyaluran bantuan benih Kementerian Kelautan dan Perikanan (APBN).
- i) Melakukan pembinaan secara berkala kepada para pengolah tentang teknik pengolahan yang baik dan higienis serta teknik pengemasan yang menarik sehingga dapat menembus pangsa pasar yang lebih luas;
- j) Menyarankan kepada petani pembudidaya untuk membuat pakan sendiri dan pakan alternative yang lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi;
- k) Mengusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/PBAT untuk menyediakan induk ikan unggul yang bekerja sama dengan BBI local;
- l) Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat tentang konservasi sumberdaya perairan maupun tentang penggunaan alat tangkap yang ramah

lingkungan serta meningkatkan partisipatif aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

m) Akan berkoordinasi dengan OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menormalisasi sungai yang melintasi BBI.

Peningkatan Produksi Benih Ikan di UPT PBAT

Capaian :

Pada tahun 2021 produksi benih tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun walaupun ditengah dampak pandemi Covid 19, target penerimaan untuk daerah dari penjualan Benih cukup memuaskan yaitu 90,4 % atau sebesar Rp. 90.405.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) dari target sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Permasalahan :

- Masih sering terjadinya bencana banjir di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar terutama PBAT Simpang Rimbo. Hal ini disebabkan karena saluran/sungai yang terjadi penyempitan;
- Tenaga teknis yang belum tercukupi dan kurang terampil;
- Sarana Prasarana yang belum sepenuhnya maksimal;
- Kualitas air yang semakin menurun,

Solusi :

- Penambahan tenaga Teknis yang terampil di UPT PBAT sesuai dengan teknis pekerjaan;
- Mengirim Tenaga teknis untuk melaksanakan pelatihan mengenai perbenihan;

- Perlu pemikiran bersama mengenai kegiatan prioritas Dinas yang UPTDnya dijadikan salah satu penerimaan pendapatan daerah;

3) Urusan Pertanian

Bidang Pertanian

Tahun 2021 bidang pertanian mengampuh 3 program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Capain

Adapun beberapa capaian/hasil pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pemberi bantuan benih sayuran daun dan sayuran buah di Kelompok Tani dalam wilayah Kota Jambi;
2. Terlaksananya pemberi bantuan Cabe dalam polybag ke Kelurahan dalam Kota Jambi;
3. Terlaksananya pemberi bantuan Toga dalam polybag ke Kelurahan dalam Kota Jambi;
4. Terlaksananya kegiatan forum perbenihan Kota Jambi;
5. Terlaksananya Bimbingan teknis Pengendalian Hama Terpadu;
6. Terlaksananya Kegiatan PPHT (Penerapan Pengendalian Hama Terpadu) di Kelompok Tani;
7. Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Usaha Pelayanan Jasa alat dan Mesin Pertanian;
8. Terbinanya Poktan/UPJA yang memanfaatkan alsintan;

9. Melakukan Monitoring Pengawasan dan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi untuk subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Melakukan Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan bersama instansi terkait dengan memeriksa dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Melakukan Pembinaan Kegiatan Lahan dan Air
12. Melaksanakan Pembangunan screen house di Kelompok Tani

Dalam melaksanakan urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat beberapa permasalahan, seperti:

1. Terjadinya gagal panen atau puso terhadap tanaman padi dan sayuran akibat bencana alam banjir;
2. Petani masih ada yang menggunakan benih yang tidak sesuai dengan anjuran sehingga dapat menurunkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
3. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk Kelompok Tani
4. Penanaman benih tanaman padi sawah masih belum serentak yang berakibat adanya serangan hama yang sulit diatasi seperti hama burung dan tikus
5. Masih belum diterapkannya teknologi pertanian yang tepat guna yang bisa meningkatkan produksi hasil pertanian oleh petani
6. Pengadaan dan penyaluran bantuan benih tanaman pangan bantuan pemerintah masih belum tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam dilapangan
7. Pemanfaatan dan pengelolaan alsintan yang belum maksimal di Kota Jambi
8. Penyaluran pupuk bersubsidi belum terserap 100 %
9. Kendala dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan dan pembinaan teknis untuk bisa mengatur jadwal tanam guna menghindari terjadinya gagal panen akibat bencana alam dan mempedomani prediksi dari BMKG mengenai kondisi cuaca dan disesuaikan dengan jadwal tanam untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana alam banjir atau kekeringan.
2. Memberikan bimbingan teknis dan pemahaman kepada petani tentang pentingnya menggunakan benih unggul bermutu agar bisa meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian;
3. Memberikan bantuan benih unggul yang bersumber dari APBD II dan mengajukan proposal bantuan benih yang bersumber dari APBD I dan APBN;
4. Perlu dilakukan musyawarah oleh Gapoktan untuk bisa melakukan jadwal tanam serentak sebelum turun kesawah.
5. Memberikan penyuluhan dan edukasi ke petani tentang pentingnya penerapan teknologi yang bisa diterapkan dilahan petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman.
6. Mengkoordinasikan dengan pihak penyedia benih bantuan pemerintah untuk bisa mengkondisikan pengadaan benih sesuai dengan jadwal tanam.
7. Melakukan pembinaan pemanfaatan alsintan yang baik dan benar pada kelompok tani dan UPJA.
8. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran benih bersubsidi, baik kepada produse, distributor, pengecer dan petani.

9. Lahan pertanian yang termasuk luas ruang terbuka hijau diizinkan untuk kegiatan pertanian dengan budidaya tanaman yang tidak merusak prasarana yang terdapat dilahan tersebut

Bidang Peternakan dan kesehatan hewan

Program yang ada di bidang Peternakan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Adapun capaian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2021 antara lain adalah Pelayanan kesehatan hewan, melalui Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan kegiatan promosi produk peternakan sebanyak 1 (satu) kali dan dilaksanakan di dalam daerah Kota Jambi tepatnya pada Hari Ulang Tahun Propinsi yang ke 64, dilaksanakan di WTC (Will Trade Center) pada tanggal 6 Januari 2021.

Capaian Bidang peternakan tahun 2021 :

1. Pelaksanaan vaksinasi rabies dilakukan sebanyak 1.000 dosis dengan anggaran APBD 500 dosis dan dukungan dari APBD-1 sebanyak 500 dosis
2. Terlaksananya penerbitan 6.192 lembar Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

Permasalahan Di Bidang Peternakan :

1. Kurangnya kemampuan petugas teknis dalam pelaksanaan kegiatan (Handling hewan)
2. Akibat pandemic banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan

3. Tidak adanya anggaran APBD/APBD-1 untuk vaksinasi penyakit SE (Vaksinasi Septicemia Epizootica). Merupakan penyakit infeksi akut atau menahun pada sapi dan kerbau yang terjadi secara septikemik
4. Belum adanya laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan sampel
5. Minimnya anggaran untuk melakukan pemeriksaan sampel
6. Semakin tingginya jumlah populasi hewan penular rabies
7. Kurang maksimalnya jumlah vaksin (Kasus rabies, SE dan Jembrana) yang tersedia
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia

Solusi yang diberikan :

1. Perlu penambahan petugas demi kelancaran kegiatan
2. Pelatihan dan refresher
3. Dana yang mendukung untuk kebutuhan kegiatan
4. Belum optimalnya data populasi hewan penular Rabies

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan

Program Penyuluhan Pertanian

Capaian

Pada Program penyuluhan pertanian pada tabel diatas dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya produktifitas tanaman pangan terlihat bahwa capaian melebihi target yaitu dari 2 % tercapai hingga 6,7 % atau 335 %. Pencapaian target tersebut disebabkan:

1. Pada produktifitas tanaman padi terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 5,45 (Tahun 2020) menjadi 4,88. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi

banjir sehingga petani melakukan panen lebih awal atau cepat dari perkiraan waktu panen.

2. Pada tanaman jagung tahun sebelumnya (tahun 2020) produktivitas sebesar 3,6 meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,8. Hal ini disebabkan adanya bantuan bibit dan saprodi pupuk yang diberikan dari dana APBD-1.
3. Pada tanaman padi target produktivitas tahun 2020 sebesar 13,20 dan tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 35,92. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan panen lebih lama atau lebih panjang yang disebabkan dengan adanya penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi

Permasalahan :

1. Belum semua kelompok tani memanfaatkan pupuk bersubsidi dengan menyusun RDKK dan di upload ke dalam E-RDKK
2. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang belum merata
3. Sebagian besar Kelompok Tani belum membuat rencana kerja kelompok secara tertulis dan belum semua Kelompok Tani melaksanakan pertemuan kelompok secara teratur
4. Pemupukan modal Kelompok Tani masih lemah dan minimnya modal petani untuk mengembangkan usaha tani
5. Dalam pelaksanaan kegiatan seksi lahan dan irigasi tahun 2018 belum mendapat dukungan dana untuk memfasilitasi seksi dalam menjalankan tupoksinya. Namun seksi lahan dan irigasi tetap berupaya untuk dapat melaksanakan tugas seoptimal mungkin
6. Optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya dukungan dana baik melalui APBD maupun APBN

Upaya Pemecahan Masalah :

1. masalah adalah dengan melakukan sosialisasi berkesinambungan pemanfaatan pupuk bersubsidi dan penyusunan e-RDCK, sehingga penyebaran pupuk bersubsidi merata
2. Melakukan pembinaan kepada poktan dan penataan UPJA secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, serta pada akhirnya tercapainya kesejahteraan petani dan keluarganya.
3. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi petani untuk mengakses modal usaha tani dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang ada Gapoktan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pembiayaan lainnya.

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui Belanja langsung dan Belanja tidak langsung yang dituangkan dalam APBD 2021 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	2021		Capaian Kinerja Keuangan 2021 (%)
		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	
2	3	6	7	8
Indeks KETahanan Pangan	Indikator Program 1 : Skor Pola Pangan Harapan	468.879.466	463.369.225	98,83
	Indikator Kegiatan 1.1: Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab./kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	234.683.478	234.441.780	99,9

Indikator Sub. Keg.1 : Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pangan pokok dan pangan lainnya - Operasi Pasar Murah HBKN - Operasi Pasar Murah - Pemantauan panel harga	234.683.478	234.441.780	99,9
Indikator Kegiatan 1.2: Persentase penyediaan cadangan pangan pemerintah	90.963.250	89.054.985	97,90
Indikator Sub. Keg.1.2.1 : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	90.963.250	89.054.985	97,9
Indikator Kegiatan 1.3 : Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	143.232.738	139.872.460	97,65
Indikator Sub. Keg.1.3.1 : Pengambilan dan pengolahan data konsumsi pangan perkapita	59.749.738	57.711.460	96,59
Indikator Sub. Keg.1.3.2 : 1. Percontohan pekarangan kelompok wanita tani 2. Sosialisasi B2SA dan Pangan local 3. Lomba cipta menu	83.483.000	82.161.000	98,42
Indikator Program 2 : Penurunan Daerah Rawan Pangan	65.203.125	64.661.540	99,17
Indikator Kegiatan 2.2: Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan	65.203.125	64.661.540	99,17
Indikator Sub. Kegiatan 2.2.1 Pembentukan dan Pembinaan Demapan	65.203.125	64.661.540	99,17
Indikator Program 3 : Peningkatan Pengawasan Pangan segar Daerah	163.653.064	158.040.840	96,57
Indikator Kegiatan 3.1 : Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kab./kota	163.653.064	158.040.840	96,57
Indikator Sub. Kegiatan 3.1.1 : 1. Jumlah kelompok tani yang prima 3 2. Jumlah petugas pengambil contoh (PPC) 3. Pembentukan Satgas Pangan	104.884.764	100.239.640	95,57
Indikator Sub. Kegiatan 3.1.2 : 1. Pengadaan bahan/alat kedokteran/laboratorium 2. Penyediaan Reagent 3. Sertifikasi komoditi pangan prima 3	58.768.300	57.801.200	98,35
Indikator Program 4 : Produksi Perikanan Budidaya	1.841.740.345	1.676.295.315	98,86
Indikator Kegiatan 4.1 : Persentase pembudi daya ikan kecil yang dibudidayakan	78.960.764	78.714.264	99,69
Indikator Sub Kegiatan 4.1.1 Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Kecil	78.960.764	78.714.264	99,69

Indikator Kegiatan 4.2 : Persentase Produksi benih	1.695.575.880	1.597.581.051	98,82
Indikator Sub Kegiatan 4.2.1 Rehab KOLam Induk	1.461.285.600	1.443.052.750	98,75
Indikator Sub Kegiatan 4.2.2 Produksi benih UPTD PBAT	134.450.616	134.180.401	99,80
Indikator Sub Kegiatan 4.2.2 Penguujian penyakit ikan	20.878.900	20.347.900	97,46
Indikator Program 5 : Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum Daratan, Sungai, Danau dan Rawa	46.082.285	43.646.054	94,71
Indikator Kegiatan 5.1 : Persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kab/Kota	46.082.285	43.646.054	94,71
Indikator Sub. Kegiatan 5.1.1 : Restocking	46.082.285	43.646.054	94,71
Indikator Program 6 : Peningkatan produksi produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan hasil Perikanan	100.082.180	93.655.530	93,58
Indikator Kegiatan 6.1 : Peningkatan produksi produk hasil perikanan	100.082.180	93.655.530	93,58
Indikator Sub. Kegiatan 6.1.1 : Berkembangnya Usaha Unit Pengolahan Ikan	100.082.180	93.655.530	93,58
Indikator Program 7 : Peningkatan PRoduktivitas Pertanian	465.798.089	453.940.206	97,45
Indikator Kegiatan 7.1 : Peningkatan Pengawasan Penggunaan Alsintan, Pupuk dan Pestisida	26.926.813	25.145.413	93,38
Indikator Sub. Kegiatan 7.1.1 : Inventarisasi dan Pengawasan Alsin Monitoring Pengawasan Pupuk dan Pestisida Penataan dan Pengembangan UPJA	26.926.813	25.145.413	93,38
Indikator Kegiatan 7.2 : Peningkatan ketersediaan Bibit Unggul	438.871.276	428.794.793	97,7
Indikator Sub. Kegiatan 7.2.1 : Jumlah produksi bibit unggul dan calon pohon induk	164.407.598	164.402.495	100
Indikator Sub. Kegiatan 7.2.2 Terpenuhinya semen beku dan nitrogrn cair untuk inseminasi bautan	104.293.884	100.380.954	96,25
Indikator Sub. Kegiatan .2.3 Penyediaan Benih/Blbit Tanaman Hortikultura	170.169.794	164.011.344	96,38
Ind. Program 8 Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	236.407.129	232.710.129	98,44
Ind. Kegiatan 8.1 Persentase Pengembangan Prasarana pertanian	60.307.379	57.698.479	95,67

Ind. Sub Keg. 8.1.1 Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	60.307.379	57.698.479	95,67
Program 9 : Pengendalian KEsehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	419.202.100	401.761.735	95,84
Indikator Kegiatan 9.1 : Persentase pengendalian penyakit hewan dan pengujian sampel kesmavet	155.199.651	142.365.860	91,73
Indikator sub. Kegiatan 9.1.1 : Sosialisasi zoonosis Tervaksinasinya hewan penular rabies	130.864.800	118.545.000	90,59
Indikator sub. Kegiatan 9.1.2 : Pemeriksaan kesehatan hewan	24.334.852	23.820.860	97,89
Indikator Kegiatan 9.2 : Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan	16.309.872	16.216.708	99,43
Indikator sub kegiatan 9.2.1 Pelayanan Jasa medik veteriner	16.309.872	16.216.708	99,43
Indikator Kegiatan 9.3 : Menjaga Pangan asal Hewan yang layak konsumsi 80 sampel	98.002.014	95.060.050	97
Indikator Sub. Kegiatan 9.3.1 : Pengujian dan pemeriksaan sampel kesmavet SOsialisasi Pangan Asal Hewan (PAH)	98.002.014	95.060.050	97
Indikator Kegiatan 9.4 : Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH	149.690.563	148.119.117	98,95
Indikator Sub. Kegiatan 9.4.1 : Jumlah pemotongan ternak Pengendalian pemotongan betina produktif	149.690.563	148.119.117	98,95
Indikator Program 10 : Luasan Pengendalian OPT	75.508.216	75.508.216	100
Indikator Kegiatan 10.1 : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	75.508.216	75.508.216	100
Indikator Sub. Kegiatan 10.1.1 : Jumlah pengendalian OPT tanaman pangan hortikultura perkebunan	75.508.216	75.508.216	100
Indikator Program 11 : Meningkatkan produktivitas tanaman pangan	72.818.095	71.642.250	100
Indikator Kegiatan 11.1 : Peningkatan jumlah kapasitas kelembagaan petani	72.818.095	71.642.250	100
Indikator Sub. Kegiatan 11.1.1 : Metode penyuluhan	72.818.095	71.642.250	100
Jumlah	3.308.209.629	3.735.231.040	98,06

Pada tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 di atas, jumlah anggaran yang ditargetkan untuk 2 program untuk urusan Wajib dan 9 program untuk urusan Pilihan, dan 18 kegiatan serta 27 sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.809.209.629,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.735.231.040,- atau sebesar 98,06 %.

Pagu anggaran yang diberikan tahun 2021, walaupun mengalami refocusing akibat Pandemi Covid dapat terealisasi dengan baik. Dampak kegiatan akibat refocusing tersebut adalah banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan banyak dana yang dibutuhkan untuk mengatasi Pandemi yang melanda dunia khususnya Indonesia.

3.2.4 Prestasi Tahun 2021

Prestasi yang dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2021 tidak ada akibat dari dampak Covid-19 dan pada tahun tersebut juga terjadi rasionalisasi anggaran pada semua kegiatan. Seluruh kegiatan ditiadakan berkaitan dengan lomba dibidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, baik yang diselenggarakan untuk tingkat Provinsi, Regional maupun Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Adapun sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam toak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dari penjelasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

B. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih rendah, khususnya kinerja masih belum banyak inovasi yang diterapkan.
2. Masih minimnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang tersedia tepat waktu saat musim tanam tiba.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian.
4. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis lapangan yang belum maksimal dalam berinovasi menerapkan kemampuan pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir.
5. Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung.

3. Harga jual hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan tidak kompetitif
4. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan laju peningkatan produksi
5. Terbatasnya lahan dan menurunnya produktifitas lahan yang disebabkan tingginya alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukkan lainnya (industri, pergudangan, pertokoan, dll)
6. Status kepemilikan lahan usahatani yang bukan milik sendiri dan luas lahan usahatani yang relatif kecil

B. Langkah-langkah Penanganan yang diperlukan untuk pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dimasa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan usaha pertanian perkotaan (Urban Farming) sebagai wadah pemanfaatan lahan sempit dan ketahanan pangan keluarga;
2. Peningkatan promosi pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Memaksimalkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang beredar di Kota Jambi;
4. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit zoonosa (penyakit hewan menular dan membahayakan manusia);
5. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi;
6. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian pangan, stabilitas harga pokok pangan dan peningkatan kualitas konsumsi keamanan pangan;
7. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras;

8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk;
9. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksana program pembangunan ketahanan pangan;
10. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di masa datang.

Jambi, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Jambi



Ir. MEIZADIARTY, MM

Pembina Tk I

NIP. 19690512 198303 2 003